

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustina, Shinta; Isra, Saldi; dkk. 2015. *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books.
- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo dan Anggota Ikapi.
- Armeh, Hamed; Salarzahi, Habibollah; Kord, Baqer, 2010. Management Control System. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol. 2, No. 6, pp. 193-206.
- Bartens, K. , 2001. *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basah, Sjahran, 1981. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Bandung: Alumni, Bandung.
- Berg, Heinz-Peter, 2010. Risk Management: Procedures, Methods and Experiences. *Risk Management. RT&A, Vol. 1, pp. 79-95*.
- British Petroleum, 2017. BP Statistical Review of World Energy 2017. BP: United Kingdom.
- Budiardjo, Miriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I Made Pasek, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Pembinaan, dan Pengawasan Kegiatan Operasi Produksi Batubara Kalimantan Timur*. Bahan Paparan, Samarinda, 15 Agustus 2018. Tidak dipublikasikan.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018. *Kebijakan Tata Kelola Pertambangan Batubara di Indonesia*. Bahan Paparan, Jakarta, 22 Februari, 2018.
- Dye, Thomas R. 1975. *Uderstanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J. Printice-Hall 2nd ed.
- Erwin, Muhammad, 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Eyeston, Robert. 1971. *The Threads of Policy : A Study in Police Leadership*. Indiana Polis. Bobbs Merrill.
- Fachruddin, Irfan, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.

- Feldman, Martha S & Khademian, Anne M, 2000. Managing for Inclusion: Balancing Control and Participation. *International Public Management Journal*, Vol. 3, pp. 149-167.
- Forrer, John; Kee, James Edwin; Newcorner, Kathryn E; Boyer, Eric, 2010. Public-Private Partnership and the Public Accountability Question. *Public Administration Review*, pp. 475-484.
- Friedman, Lawrence M., 2001. *American Law: An Introduction, Second Edition*, Penerjemah : Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Fuady, Munir, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ghosh, S. M.; Sharma, H.R.; Mohabay, V., 2011. Analysis and Modeling of Change Management Process Model. *International Journal of Software Engineering and Its Application*, Vol. 5, No. 2, pp. 123-133.
- Hasan, Yaser; Shamsuddin, Alina; Aziati, Nor, 2013. The Impact of Management Information Systems Adoption in Managerial Decision Making: A Review. *Management Information Systems*, Vol. 8, No. 4, pp. 10-17.
- Husin, Sukanda, 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Istanto, F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Joshua, Okpanachi & Mohammed, Nina Ahmed, 2013. Budget Target Setting and Effective Performance Measurement in Nigerian Hospitality Industry. *Journal of Finance & Economics*, Vol. 1, Issue 3, pp. 39-50.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah pada Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta. Tidak dipublikasikan.
- Kementerian ESDM, 2018. *Tindak Lanjut Korsup Minerba dan Korsup Energi 2017*. Bahan Paparan, Jakarta, 24 Januari 2018. Tidak dipublikasikan.
- _____, 2018. *Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara*. Bahan paparan. Tidak dipublikasikan
- Lotulung, Paulus Efendie, 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.L Jingan,, 2017. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Ménard, Claude, 2004. The Economics of Hybrid Organizations. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, Vol. 160. No.3 (September 2004). pages 345-376.
- Muhjad, M Hadin, 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising.

- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Murjanto, Djati. 2011. *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*. Makalah pada Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Nee, Victor. 2003. The New Institutionalism in Economics and Sociology. *Center of Study Economy and Society*. Volume 4, November 2003
- Olumoye, Mosud Y, 2013. Impact of Information Systems on Management Decision-Making in The Nigerian Insurance Sector. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 2, Issue 12, pp. 123-128.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel, 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media
- Purbacaraka, Purnadi dan A Ridwan, 1990. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali.
- Rahmadi, Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjidi, Lili, 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*,. Bandung: Bandar Maju
- Riyanto, Budi, 2003. *Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Saleng, Abrar, 2014. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salman, Otje, 2015. *Teori Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiardja, A. Gunawan, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sinamo, Nomensen, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sitorus, M. 2003. *Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P₂O₅ daun Jagung pada Ultisol*. Skripsi pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Tidak dipublikasikan.
- Soekanto, Soejono, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Syafrudin, Ateng, 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.
- The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, 2015. *Laporan Rekonsiliasi EITI 2015*. Jakarta: EITI
- Vanagas, Ramūnas & Stankevič, Janina, 2014. Impact of Coordination for Organization Process. *Intellectual Economics, Vol. 8, No. 2, pp. 112-125*.
- Watts, T. & McNair-Connolly, C. J. (2012). New performance measurement and management control systems. *Journal of Applied Accounting Research*, 13 (3), 226-241.
- Williamson, Oliver E. 1975. *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. New York: The Free Press
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Medpress.
- Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Website

Bisnis.com, 2018. Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah. Diakses dari

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180114/44/726374/jaminan-reklamasi-pascatambang-masih-rendah>

CNBC Indonesia, 2018. Wow! Nilai Cadangan Mineral dan Batu Bara Inalum Rp 6.528 T. Diakses dari

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180605100554-4-17862/wow-nilai-cadangan-mineral-dan-batu-bara-inalum-rp-6528-t>

EITI Indonesia, 2016. *Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi*. Diakses dari <http://eiti.ekon.go.id/mulai-oktober-2016-perizinan-pertambangan-dialihkan-ke-provinsi/>

Indonesian Commercial Newsletter, 2011. Industri Pertambangan Logam di Indonesia. Diakses dari

<http://www.datacon.co.id/Logam-2011ProfilIndustri.html>

Indonesia Investments, 2018. Batubara di Indonesia. Diakses dari

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. Hijaukan Lahan Pascatambang di Provinsi Bangka Belitung. Diakses dari

<http://www.menlhk.go.id/berita-10841-hijaukan-lahan-pasca-tambang-di-provinsi-bangka-belitung.html>

Limahekin, Thom, 2018. *Ini Jumlah Dana Pasca Tambang Bidikan KPK yang Mengendap di Kepri, Terbesar Kabupaten Bintan*. Diakses dari <http://batam.tribunnews.com/2018/06/08/ini-jumlah->

Bv <http://batam.tribunnews.com/2018/06/08/ini-jumlah->
[/dana-pasca-tambang-bidikan-kpk-yang-mengendap-di-kepri-terbesar-kabupaten-bintan](http://batam.tribunnews.com/2018/06/08/ini-jumlah-)

Mongabay, 2018. Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis. Diakses dari

<https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>

PT ANTAM, 2016. Keanekaragaman Hayati. Diakses dari

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=211&lang=id

Rizwan, 2018. *GeRAK: PT BEL Abaikan Reklamasi*. Diakses dari <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/18/gerak-pt-bel-abaikan-reklamasi>

Ruku, Niko, 2018. *45 Perusahaan Tak Setor Jamrek Jatim Kaltara Sebut Kerugian Negara Rp201 Miliar*. Diakses dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/03/12/45-perusahaan-tak-setor-jamrek-jatam-kaltara-sebut-kerugian-negara-rp-201-miliar>

Tempo, 2018. Reklamasi Lubang Sisa Tambang. Diakses dari

<https://kolom.tempo.co/read/1094037/reklamasi-lubang-sisa-tambang/full&view=ok>